BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan suatu Provinsi dalam mengelola Kabupaten/Kota dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran, menurut Mahmudi (2007:140-142) dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, *Debt Service Coverage Ratio,* dan rasio pendapatan terhadap utang. Sedangkan menurut Halim (2004) diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang ada di pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Masing-masing sumber keuangan atau Pendapatan daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPBN) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mencatat, realisasi belanja dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) di Provinsi Sumatera Selatan masih terbilang rendah. Dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan, 61% terserap ke belanja pegawai, barang 28,68 %, dan 13,11 % ke belanja modal. Dengan demikian, kinerja yang perlu ditingkatkan dalam hal belanja modal yaitu pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur. Hal ini dikarenakan belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. *(Sumber:http://palembang.tribunnews.com)*

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal guna menambah aset tetap daerah tersebut. Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal juga dapat diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Dibawah ini akan disajikan grafik pergerakan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut:

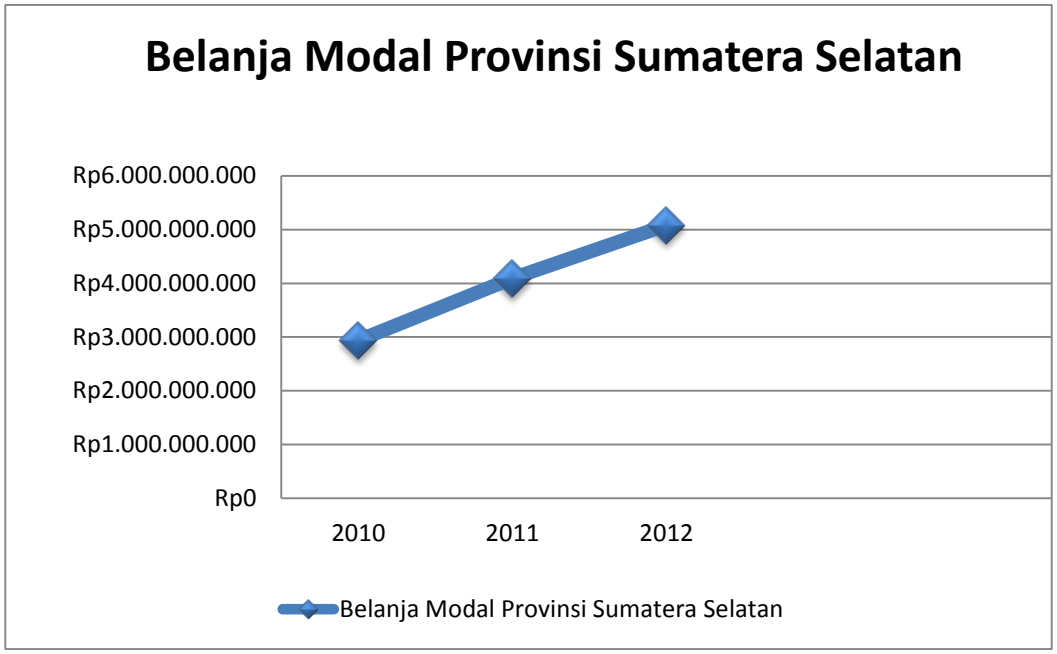

Gambar.1 Grafik Jumlah Total Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan
Sumber : www.sumsel.bps.go.id , 2017

Dilihat dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Pada tahun 2010 Total Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp 2.935.056.288. Di tahun 2011 Total Belanja Modal jauh meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 4.090.598.094. Di tahun 2012 Total Belanja Modal Sumatera Selatan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 5.084.161.336. Total Belanja Modal dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset. Dimana manfaat ini akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan

pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang. Tingkat ketergantungan daerah diukur dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, seperti belanja operasional maupun belanja modal. Semakin banyak kebutuhan belanja yang terpenuhi dengan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, begitupun sebaliknya, semakin sedikit kebutuhan belanja yang dapat terpenuhi, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah.

Suatu daerah akan dikatakan efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah apabila presentase rasionya minimal mencapai 1%. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka kemampuan daerah tersebut semakin baik.

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas terhadap belanja modal, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Silitonga (2009) adalah rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian Gerungan dkk (2012) adalah rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian Melasari, dkk (2014) adalah rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian Lestari (2017) rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian Martini dan Dwirandra (2015) adalah rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Ardhini (2010) adalah rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Assyurriani (2015) mengatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai belanja modal yang mengalami perubahan dan hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Skripsi ini diberi judul **"Pengaruh Rasio Kemandirian, Ketergantungan, dan Efektivitas Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan."**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan penulis bahas untuk Skripsi ini adalah :

1. Apakah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas, berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas, berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Sumatera Selatan?

1.3. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektivitas terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan ialah Laporan Realisasi Anggaran PAD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, makan tujuan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan efektivitas secara parsial terhadap belanja modal.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh rasio kemandirian rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas secara simultan terhadap belanja modal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan perbandingan dengan teori – teori yang didapat diperkuliahan khususnya mengenai kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektivitas) terhadap belanja modal.

2. Bagi Entitas Pemerintah

   Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.

3. Bagi Lembaga Polsri

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya dijurusan Akuntansi.